



## Kebijakan Uni Eropa Menghadapi Euroskeptisisme

Muhammad Yusuf Abror<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Indonesia

Korespondensi: [yusuf\\_abror@fisip.unsri.ac.id](mailto:yusuf_abror@fisip.unsri.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini memberikan penjelasan mengenai tantangan Uni Eropa saat ini yaitu euroskeptisisme yang dapat menjadi ancaman eksistensi Uni Eropa. Integrasi Eropa yang telah berjalan sejak 1951 di dalam perjanjian Paris harus dapat menyesuaikan keadaan politiknya saat ini. Uni Eropa yang memiliki kekuatan besar dalam integrasinya ternyata menyimpan rasa skeptisisme dari masyarakatnya sendiri. Tulisan ini bertujuan mengelaborasi lebih dalam lagi mengenai euroskeptisisme dan kebijakan Uni Eropa dalam mengatasinya. Melalui metode penelitian *desk study* peneliti mengambil sumber data dari berbagai jurnal, buku, dan kanal resmi lembaga pemerintah. Penulis berargumen bahwa tantangan Uni Eropa dalam menghadapi euroskeptisisme adalah rasa kurang percaya sebagian masyarakat Eropa dan elit politik anti Uni Eropa kepada kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa karena dianggap kurang transparan dan tidak mengakomodir kepentingan negara anggota. Krisis ekonomi menjadi masalah utama bagi eksistensi Uni Eropa yang mengakibatkan apakah organisasi ini masih dapat dipercaya untuk kemajuan anggotanya. Selain itu terjadi ketegangan perbatasan eksternal yaitu gelombang pengungsi dan pencari suaka, sehingga melihat ini sebagai ancaman ketahanan nasional dan ancaman sosial serta ekonomi. Isu-isu tersebut membuat sebagian masyarakat dan elit politik Uni Eropa menganggap adanya kedaulatan yang hilang bagi negara-negara anggota karena semua regulasi diatur Uni Eropa.

**Kata kunci:** Euroskeptisisme, integrasi, kebijakan, Uni Eropa

### Abstract

*This article explains the current challenge of the European Union, namely Euroscepticism which can be an existential threat from the European Union. European integration, which has been going on since 1951 in the Paris Agreement, must be able to adapt to its current political situation. The European Union, which is known to have great power in its integration, turns out to harbor a sense of skepticism from its society. This paper aims to elaborate more deeply on Euroscepticism and policies in overcoming it. Through the desk study research method, researchers take data sources from various journals, books, and official channels of government institutions. The the EU's challenges in dealing with euroscepticism is a lack of trust of some Europeans and anti-EU political elites in the policies issued by the EU because they are considered less transparent and does not accommodate the interests of member states. The economic crisis is a major problem for the existence of the European Union which results in whether*

### RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 11/06/2024

Ditelaah: 04/08/2024

Diterbitkan: 12/11/2024

### KUTIPAN

Abror, M.Y. (2024).

Kebijakan Uni Eropa

Menghadapi

Euroskeptisisme

.PESIRAH: Jurnal

Administrasi Publik, 5(1),

91-103, doi:

10.47753/pjap.v5i1.134





*this organization can still be trusted for the advancement of its members. In addition, there are external border tensions, namely waves of refugees and asylum seekers, so this is seen as a threat to national security and a social and economic threat. Then, the most important thing is the sense of loss of sovereignty for member states because all regulations are regulated by the European Union*

**Keywords:** *European Union, Euroscepticism, integration, policy*

## PENDAHULUAN

Uni Eropa saat ini sedang dilanda rasa skeptis oleh sebagian masyarakatnya sendiri. Uni Eropa dihadapkan ke banyak tantangan seperti krisis utang di zona Euro, gelombang pengungsi dan Schengen (pembebasan perbatasan antar negara Uni Eropa), ancaman teroris, pengaruh Euroskeptis dari para politisi, dan yang terakhir adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Kaplan, 2023). Euroskeptisisme merupakan sikap yang tidak setuju dan meragukan manfaat dari Uni Eropa. Apakah Uni Eropa saat ini masih relevan untuk tetap dilanjutkan atau negara anggota lebih baik meninggalkan organisasi ini. Terlebih setelah proses Brexit sejak 2015 lalu telah selesai dengan diawali referendum pada tahun 2016 dan secara resmi menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa di tahun 2020. Maka, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melihat apa kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dalam menghadapi sikap dan pandangan Euroskeptisisme. Hal tersebut dapat menggoyahkan integrasi Uni Eropa yang telah dibangun sejak 1951 dalam perjanjian Paris lalu. Euroskeptisisme dapat dipahami bentuk oposisi dan meragukan mengenai proses integrasi Eropa (Ultan & Ornek, 2015). Sedangkan menurut Hooghe dan Marks Euroskeptisisme adalah keraguan atau ketidakpercayaan/ketidakyakinan pada Eropa dan integrasi Eropa sehingga secara umum hal ini mengkritik posisi dari integrasi Eropa (Hooghe & Marks, 2007). Istilah ini muncul pertama kali dari majalah *The Economist* pada 26 Desember 1992 akibat dari opini publik mengenai penyesuaian aturan kemurnian bir agar sesuai dengan pasar yang disepakati dalam perjanjian Maastrich. Bir di Jerman menjadi identitas nasional negara maka mencampuri urusan pembuatan bir membuat kedaulatan mereka diintervensi oleh Uni Eropa. Sehingga akhirnya Uni Eropa dianggap tidak demokratis dan membutuhkan reformasi mendasar hal ini terlihat dari data yaitu 66% warga negara merasa suara mereka tidak diperhitungkan di Uni Eropa (Brack & Startin, 2015). Seperti misalnya aturan Uni Eropa mengenai kebijakan iklim dan energi yang bertujuan membatasi emisi CO<sub>2</sub> dan mengurangi industri batubara, sedangkan Polandia yang bergantung pada industri batubara menjadi dipaksa untuk menguranginya (Fomina, 2017). Tentu ini mendapatkan tantangan tersendiri dari Polandia dan kebebasan dalam industri dalam negerinya. Selain itu, nilai-nilai yang dianut oleh Uni Eropa seperti mempromosikan kesetaraan gender dan hak LGBT membuat nilai ini tidak sesuai dengan budaya Polandia karena Polandia memiliki identitas nasional berupa keyakinan terhadap Katolik sebagai landasan beragama (Fomina, 2017). LGBT dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional Polandia sehingga tidak dapat menerima nilai-nilai tersebut.

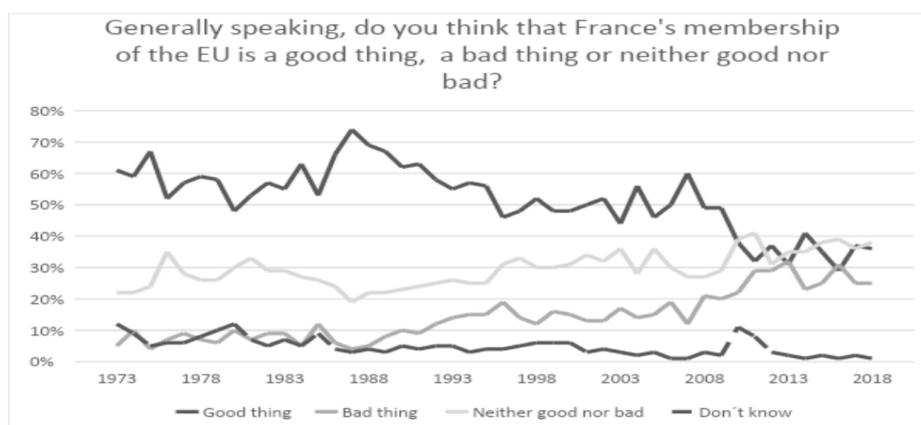
Kesenjangan yang dapat dilihat yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai Uni Eropa yaitu ada yang pro integrasi dan ada yang pro disintegrasi. Partai radikal sayu kiri berpendapat mereka ingin mempertahankan kesejahteraan negara dan oposisi terhadap liberalisasi pasar, sedangkan partai radikal kanan menganggap bahwa Uni Eropa dapat mengancam bagi kedaulatan negara dan homogenitas budaya, meningkatnya proteksi, serta anti terhadap imigran (van Elsas & van der Brug, 2016). Padahal Uni Eropa telah berdiri puluhan tahun, tetapi terjadi masalah tantangan dari pandangan Euroskeptisisme menjadi ancaman disintegrasi. Jean Monnet dan Robert Schuman dapat dianggap sebagai Bapak Pendiri Uni Eropa meyakini bahwa integrasi Eropa memiliki dua tujuan utama yaitu politik dan ekonomi (Kopecky & Mudde,

2002). Maka, penelitian ini berusaha melihat bagaimana kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi Euroskeptisisme agar dapat mempertahankan eksistensi organisasi melalui konsep Euroskeptisisme. Konsep ini menjadi landasan penulis menganalisis lebih lanjut mengenai solusi kebijakan yang dapat meredakan sikap reaktif dari pandangan Euroskeptisisme. Konsep dari Euroskeptisisme ini yaitu penolakan terhadap regulasi yang dibuat oleh Uni Eropa dengan indikator meluasnya krisis ekonomi global, gelombang pengungsi, dan keamanan negara (Vasilopoulou, 2018).

Belum lagi masalah krisis ekonomi yang melanda Eropa pada tahun 2009, 2018, dan 2020 lalu. Krisis mata uang tunggal Euro akibat banyaknya hutang di negara anggota seperti Yunani, Spanyol, Portugal, Italia, dan Irlandia. Mereka kesulitan membayar hutang tersebut membuat ketidakstabilan ekonomi karena terdapat negara yang surplus dan ada negara yang defisit mengakibatkan rasa skeptis terhadap Uni Eropa semakin mendalam. Selain masalah krisis ekonomi, isu lain yang membuat rasa skeptis timbul di Uni Eropa adalah masalah pengungsi yang dianggap sebagai beban bagi perekonomian negara anggota Uni Eropa. Selain itu terdapat masalah sosial karena perbedaan budaya antara pengungsi dengan pendudukan asli. Serta isu keamanan yang mengkhawatirkan seperti teroris, perdagangan orang dan narkoba serta isu kejahatan transnasional lainnya. Isu pengungsi ini sudah menyebar ke berbagai aktor baik horizontal yaitu masyarakat (pengungsi) dengan masyarakat dan vertikal antara masyarakat (pengungsi) dengan elit politik/pemerintah. Sehingga terjadi benturan di akar rumput Uni Eropa yang membuat permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun aktor-aktor anti-Uni Eropa ini antara lain yaitu The United Kingdom Independence Party (UKIP) di Inggris dan sudah berhasil keluar dari Uni Eropa, Alternative fur Deutschland (AfD) di Jerman, Golden Dawn di Yunani, The National Front di Perancis, dan Five Star Movement (M5S) di Italia dan partai-partai populis lainnya di berbagai negara-negara anggota Uni Eropa (Setiabudi, 2021).

Sentimen negatif ini pernah disampaikan Margaret Thatcher dengan menyatakan bahwa negara-negara Eropa telah didominasi Brussel (ibu kota Uni Eropa) (Ebru, 2019). Sentimen tersebut menumbuhkan rasa kesenjangan antar elit politik dan warga negaranya yang merasakan bahwa negara mereka diatur Uni Eropa. Sehingga mereka menganggap kedaulatan negara secara tidak langsung menjadi hilang. Isu ini terus berkembang ke banyak negara dan dalam penilaian yang dilakukan Eurobarometer terhadap publik Perancis mengenai bagaimana penilaian warga Perancis menjadi negara anggota Uni Eropa.

**Grafik 1.1 Penilaian Keanggotaan Perancis di Uni Eropa, 1973-2018**



*Sumber: Likaj, Rieble, & Theuer (2020)*



Grafik 1.1 menjelaskan mengenai pandangan masyarakat Perancis tentang penilaian keanggotaan Perancis di Uni Eropa. Terdapat empat penilaian yaitu *Good thing*, *Bad thing*, *Neither good nor bad*, dan *Don't know*. Dari keempat penilaian tersebut penilaian terhadap persepsi baik (*good thing*) mengenai Uni Eropa sejak tahun 1973 hingga 2018 terus menurun dari 60% hingga sekitar 38% dan sebaliknya persepsi buruk terhadap Uni Eropa terus meningkat dari sekitar 11% di tahun 1973 meningkat hingga sekitar 25% di tahun 2018. Serta selebihnya menganggap baik atau buruk terhadap Uni Eropa bersifat fluktuatif. Data tersebut telah menjelaskan bahwa memang terjadi pandangan skeptis dari integrasi Eropa ini dan menjadi ancaman disintegrasi bagi Uni Eropa. Perancis dalam mengatasi Euroskeptisisme adalah dengan cara tidak melakukan referendum pada kesepakatan Lisbon dan reformasi ekonomi (Glencross, 2023). Kesepakatan Lisbon tersebut dianggap terlalu kuat intervensi dari Uni Eropa kepada negara anggotanya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Euroskeptisisme

Euroskeptisisme dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa dari para aktor-aktor politik (Ultan & Ornek, 2015). Dalam hal ini adalah adanya rasa skeptis terhadap rezim internasional Uni Eropa dari anggota-anggota negaranya. Hal ini bisa membuat Uni Eropa terancam eksistensinya jika tidak membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membendung Euroskeptisisme ini. Euroskeptisisme timbul di banyak negara anggota Uni Eropa seperti Inggris yang telah keluar melalui kampanye Brexit. Selain itu terdapat negara anggota lain yang di dalamnya terdapat partai-partai politik yang ingin keluar dari Uni Eropa, yaitu Yunani dengan Grexit (*Greek Exit*). Alasan utamanya adalah krisis keuangan global yang mempengaruhi ekonomi domestik dan gelombang migrasi yang datang ke Yunani (Vasilopoulou, 2018).

Glombang krisis ekonomi global yang dirasakan Yunani membuat negara ini merasakan akibatnya dan ditambah gelombang migrasi yang besar memasuki Yunani. Hal ini dianggap oleh pihak anti-Uni Eropa sebagai bentuk ketidakmampuan Uni Eropa dalam menanggulangi masalah tersebut. Bahkan timbul slogan "*Greece belongs to the Greeks*" (Vasilopoulou, 2018) yang menyatakan sikap anti-Uni Eropa karena Uni Eropa dianggap mengintervensi urusan dalam negeri Yunani. Masyarakat merasa tidak ada keuntungan dalam hal sosial-ekonomi sehingga memperbesar dukungan terhadap pihak-pihak Euroskeptis dan ketidakpercayaan pada Uni Eropa (Vasilopoulou & Talving, 2023). Selain itu terjadi ceruk yang lebar di antara negara-negara anggota Uni Eropa sehingga membentuk ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan ini yang kemudian pada akhirnya timbul Euroskeptis dan ketidakpercayaan pada lembaga Uni Eropa (Vasilopoulou & Talving, 2023).

Selain terdapat istilah Euroskeptisisme, Europhobia adalah istilah lain untuk menentang ide-ide integrasi Uni Eropa. Biasanya mereka memiliki posisi sebagai nasionalis, sosialis atau isolasionalis dikarenakan mereka meyakini integrasi Uni Eropa tidak bisa menghadapi keberagaman antar negara-negara Eropa (Kopecky & Mudde, 2002). Mereka lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan nasional negara ketimbang harus bekerja sama di dalam Uni Eropa karena dianggap merugikan kepentingan nasional dan memberikan ancaman keamanan serta ekonomi.

Pandangan Euroskeptisisme dapat dibagi menjadi dua istilah yaitu "*Hard Euroscepticism*" yaitu pihak-pihak yang menolak sama sekali integrasi ekonomi dan politik Eropa dan mengambil sikap untuk oposisi terhadap Uni Eropa. Sedangkan istilah kedua yaitu "*Soft Euroscepticism*" merupakan pihak-pihak yang tidak sepakat terhadap beberapa kebijakan yang dibuat namun masih sepakat di dalam Uni Eropa (Vasilopoulou, 2009). Kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara mereka memiliki hak untuk *opt-out* yaitu tidak mengadopsinya. Jadi dapat disimpulkan terdapat dua



bentuk sikap terhadap Euroskeptisisme yaitu *Hard Euroscepticism* dan *Soft Euroscepticism* yang mengisi ruang-ruang diskursus di lingkungan Uni Eropa.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian *desk study* yaitu mengkajinya dalam bentuk deksriptif kualitatif yang mengambil data dari pihak kedua atau data sekunder berupa jurnal-jurnal, buku, dan data dari lembaga resmi pemerintah. Maka, fokus penelitian ini menggunakan variabel kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan Euroskeptisisme dengan menggunakan studi literatur dalam menguji kebenarannya. Sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data reduksi dan menguji dengan triangulasi data sehingga didapatkan data yang lebih terkerucut validasinya.

Menurut Miles *et al.*, analisis data kualitatif dapat dicapai dengan tiga cara, yaitu kondensasi data, *display* data, dan mengambil kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Kondensasi data adalah fokus pada proses pemilihan data, memfokuskan data, menyederhanakan data yang didapat dari lapangan, transkrip *interview*, dokumen, dan data empiris lainnya. Sedangkan *display* data merupakan penyajian data yang dibuat dalam bentuk grafik, metrik, bagan, dan jaringan yang kemudian diambil kesimpulan dari grafik tersebut. Kemudian verifikasi data menjadi kesimpulan akhir dari suatu penelitian dengan melihat pola, alur, dan penjelasan dari data yang telah diinterpretasikan sebelumnya.

Di dalam artikel ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari jurnal-jurnal, lembaga pemerintah, dan *website* resmi yang menyajikan data secara resmi. Setelah itu, dilakukan pemilihan data sesuai dengan keadaan yang dijelaskan di dalam dokumen yang telah dikumpulkan. Lalu, hasil dari penjelasan dalam data seperti grafik diambil suatu kesimpulan dengan cara verifikasi data satu dengan data lainnya. Sehingga terlihat pola yang dapat diinterpretasikan sebagai sebuah *justifikasi* valid.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Euroskeptisisme menjadi isu yang menakutkan bagi integrasi Uni Eropa dan dapat mengancam eksistensi dari organisasi ini. Maka, dalam penulisan artikel ini peneliti melakukan batasan terhadap bentuk kebijakan yang dapat mengatasi isu Euroskeptisisme ini. Kebijakan-kebijakan ini menjadi obat dan juga penawar agar kesatuan Uni Eropa dapat tetap utuh. Kekhawatiran pecahnya integrasi Uni Eropa ini tentu bukan tanpa alasan, setelah sebelumnya Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa membuat rasa tidak tenang. Khawatir jika ini bisa menjadi pemicu gelombang besar bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk meninggalkan keanggotaannya. Sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang relevan dan kuat agar kepercayaan negara-negara anggota dapat terus tumbuh.

Dalam artikel ini penulis berargumen bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam mengatasi sikap Euroskeptisisme adalah dengan cara memperkuat sektor moneter melalui lembaga *European Central Bank* (ECB) sehingga kekhawatiran terhadap krisis ekonomi yang menerpa Uni Eropa dapat diatasi. Seperti ketika Uni Eropa mengalami krisis ekonomi pada tahun 2021 hingga 2022 yaitu saat terjadi pandemi Covid-19. Ketika itu Uni Eropa mendapatkan berbagai kritik dari negara anggotanya sendiri karena dianggap kurang dapat memberikan solusi dari krisis ekonomi akibat pandemi tersebut. Bahkan pada saat itu, negara Utara seperti Skandinavia dengan negara Selatan seperti Italia dan Spanyol saling berdebat mengenai pendanaan khusus pandemi ini. Negara Utara yang lebih makmur kurang sepakat adanya *Coronabound* karena dianggap akan membebani keuangan Uni Eropa. Namun negara Selatan meminta adanya bantuan dana tersebut karena ini menjadi hal yang dibutuhkan negara anggota Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa memperkuat perbatasan eksternal dari gelombang pengungsi dan kejahatan transnasional dengan cara membentuk regulasi dalam kesepakatan Schengen. Kesepakatan yang dibuat ini bertujuan untuk menyaring orang asing sehingga dapat dilakukan deteksi dini dan pencegahan dari



kejahatan transnasional yang dapat mengancam ketahanan nasional. Kesepakatan Schengen ini merupakan kesepakatan yang juga banyak dikritik negara anggota terutama yang anti terhadap kesatuan Uni Eropa karena dianggap mengancam keamanan nasional. Maka, Uni Eropa membentuk kebijakan Schengen *Information System* (SIS) untuk melakukan pencegahan masuknya orang asing yang memiliki rekam jejak tidak meyakinkan seperti tidak jelas pekerjaannya atau tujuannya masuk ke Uni Eropa. Kebijakan lain yang dibuat Uni Eropa dalam menghadapi Euroskeptisisme adalah dengan cara membentuk *Visa Information System* (VIS). VIS ini berguna untuk mencegah adanya ‘*Visa Shopping*’ sehingga orang asing yang telah ditolak oleh negara anggota tidak dapat lagi melakukan aplikasi ke negara anggota lainnya. Serta Uni Eropa juga membentuk Euordac untuk mencegah masuknya pencari suaka atau biasa disebut dengan ‘*asylum shopping*’. Dengan demikian pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Uni Eropa dapat didata dengan baik dan menolak pencari suaka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Syarat pencari suaka salah satunya adalah mendapatkan ancaman HAM dari negara asalnya, bisa berupa perang atau intimidasi dari negara/kelompok. Sedangkan pencari suaka dengan tujuan ekonomi tidak dapat diterima sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat menyaring pencari suaka yang sebenarnya. Semua kebijakan tersebut menjadi cara Uni Eropa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Uni Eropa dan menurunkan sikap Euroskeptisisme. Penjelasan argumen penulis lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dalam menghadapi Euroskeptisisme dapat dijabarkan pada analisis berikut.

## 1. Tantangan Uni Eropa Menghadapi Euroskeptisisme

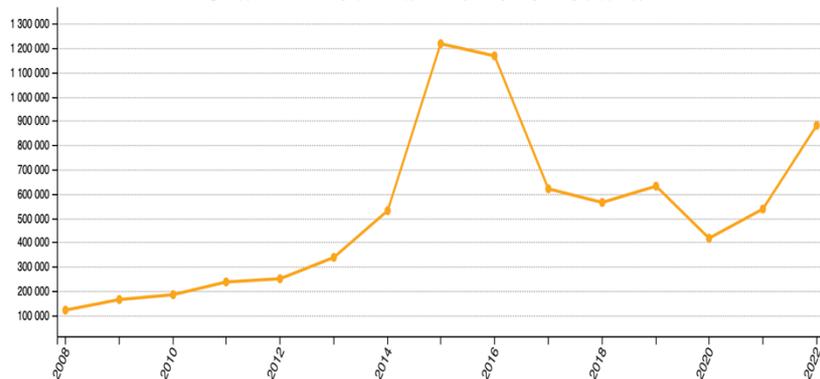
Tantangan yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam menghadapi Euroskeptisisme dapat dilihat dari rasa tidak percaya terhadap regulasi yang dibuat oleh Uni Eropa, rasa khawatir dari gelombang pengungsi dan pencari suaka, ancaman keamanan nasional, serta kedaulatan negara. Dalam hal tantangan mengenai kedaulatan negara menghasilkan bahwa negara anggota Uni Eropa kehilangan kendali terhadap keputusan negara mereka sendiri. Seperti misalnya pengaruh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh *European Central Bank* (ECB) bagi negara yang mengadopsi euro sebagai mata uangnya. Selain itu mengenai kebijakan perdagangan, kebijakan ini mengatur perjanjian antara Uni Eropa dengan negara di luar Uni Eropa.

Sehingga dapat dikatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa menitipkan kepentingannya kepada Uni Eropa. Seolah ini membuat negara anggota tidak dapat bekerja sama secara langsung dengan negara lain. Tentu ini menjadi kendala bagi negara anggota jika mereka ingin melakukan kesepakatan dagang secara independen dengan negara lain. Uni Eropa juga memiliki standar mengenai lingkungan yang harus diikuti oleh seluruh negara anggota seperti misalnya penerapan regulasi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) yang mengatur mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ ini diaplikasikan kepada seluruh negara secara global sehingga dapat berdampak pada kerja sama dengan negara yang dianggap merusak hutan. Dalam hal ini misalnya berdampak serius bagi perdagangan antara negara-negara di Uni Eropa dengan Indonesia khususnya mengenai *Crude Palm Oil* (CPO) sehingga membuat negara-negara anggota Uni Eropa tidak bisa dengan bebas membeli CPO dari Indonesia.

Kemudian tantangan yang dialami Uni Eropa dalam hal pandangan mengenai Euroskeptisisme ini yaitu kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi ini “memaksa” negara anggota Uni Eropa untuk mengaplikasikan kebijakan mulai dari perbatasan bersama, pengungsi, dan imigrasi. Dalam hal perbatasan khususnya bagi negara anggota Schengen Area, mereka harus melonggarkan batas negara dan menghilangkan hambatan di perbatasan. Sehingga perbatasan negara ini tidak ubahnya seperti perbatasan provinsi di dalam satu negara. Ini yang kemudian membuat pemikiran bahwa negara anggota Uni Eropa dianggap kehilangan kedaulatannya. Belum lagi soal pengungsi yang mengharuskan negara anggota menerima para pengungsi

yang masuk tanpa boleh mengusir mereka sebelum didata dan dikarantina terlebih dahulu. Seperti diketahui bahwa Uni Eropa merupakan entitas yang pro terhadap kemanusiaan karena dasar fundamental mereka adalah liberalisme. Sedangkan negara-negara anggota tidak menganggap semua isu soal pengungsi harus diterima oleh mereka. Terkadang negara-negara anggota mengambil kebijakan untuk menolak pengungsi dan mengusir pengungsi. Tindakan ini jauh dari fundamental liberalisme yang bersifat kooperatif. Tindakan tersebut lebih dekat ke ranah realisme yaitu negara harus melindungi dirinya dari potensi-potensi ancaman luar negara termasuk di dalamnya adalah mengenai pengungsi.

**Grafik 1.2 Jumlah Pemohon Suaka**



*Sumber: Eurostat (2023)*

Dapat dilihat dari grafik 1.2 bahwa jumlah pencari suaka ataupun pengungsi secara umum terus meningkat seperti pada tahun 2008 Uni Eropa memiliki 100.000 lebih pengungsi namun jumlah ini meningkat tajam di tahun 2015 hingga 1,2 juta pengungsi. Meskipun di tahun selanjutnya terus menurun, namun kembali naik di tahun 2021 hingga 2022. Di tahun 2022 sendiri masih dalam keadaan pandemi Covid-19, namun jumlah pengungsi tetap tinggi yaitu di angka 900.000 orang. Tentu ini menjadi semakin kuat rasa skeptisme terhadap Uni Eropa karena dianggap tidak dapat mengurangi jumlah pengungsi yang datang dan menjadi ancaman bagi kepentingan nasional negara anggota. Menjadi berlawanan pendapat dengan Uni Eropa yang memiliki dasar pandangan liberalisme menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. Kebijakan Uni Eropa Menghadapi Euroskeptisisme

Tantangan yang menjadi masalah di Uni Eropa sebenarnya lebih ke bentuk politis yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa dianggap merugikan bagi negara-negara anggotanya dengan demikian terbentuklah pandangan skeptis atau biasa disebut dengan Euroskeptisisme. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Misalnya pada masalah kedaulatan yang dianggap negara kehilangan kedaulatan dan kendali. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena negara tetap memegang kendali terhadap diri sendirinya. Uni Eropa memang sebagai pemegang kendali penuh dalam setiap regulasi yang dibuat namun setiap regulasi yang dibuat ini akan dibawa ke domestik negara anggota. Regulasi tersebut harus diterapkan dengan sistem referendum bersama rakyatnya. Jika hasil referendum menghasilkan persetujuan untuk menerapkan kesepakatan dan sebaliknya jika rakyat tidak setuju maka tidak perlu ada penerapan regulasi dari Uni Eropa.

Seperti pada regulasi *The Schengen Acquis* yang memberikan kebebasan berlalu-lintas di perbatasan antar negara. Semua negara yang sepakat dengan regulasi Schengen ini maka harus menghilangkan hambatan di perbatasan seperti lalu lintas manusia, barang, dan modal. Namun, negara seperti Irlandia,

Rumania, Bulgaria, dan Siprus sebagai negara anggota Uni Eropa saat ini belum menerapkan aplikasi dari regulasi yang terdapat dalam Schengen Area secara menyeluruh. Artinya adalah kedaulatan negara masih eksis dan diakui oleh Uni Eropa, semua regulasi yang dibuat oleh Uni Eropa kemudian dapat disetujui dan diaplikasikan atau ditolak oleh negara anggota.

Gambar 1.1 Wilayah Schengen



Sumber: Council of the European Union (2023)

Dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa terdapat beberapa negara Uni Eropa yang memilih belum menerapkan regulasi Schengen Area secara menyeluruh bagi negaranya seperti negara Irlandia pada warna jingga, Denmark pada warna biru pucat, dan Rumania, Bulgaria, serta Siprus pada warna hijau. Sehingga kehadiran Uni Eropa dapat dikatakan tidak menghilangkan kedaulatan negara tertentu. Regulasi yang dibuat oleh Uni Eropa dalam hal penerapannya dikembalikan lagi kepada negara-negara anggota.

Regulasi dalam pembentukan kebijakan Schengen ini telah dibuat sejak tahun 1985 dan diintegrasikan ke Uni Eropa sejak Perjanjian Amsterdam pada tahun 1999. Alasan ini sebenarnya untuk memperkuat keamanan nasional dari negara-negara anggotanya agar isu perbatasan dapat diatasi oleh Uni Eropa. Seperti yang dapat dilihat dari isi Perjanjian Amsterdam di bawah ini:

*Preamble Perjanjian Amsterdam:*

*“Resolved to facilitate the free movement of persons, while ensuring the safety and security of their peoples, by establishing an area of **freedom, security and justice**, in accordance with the provisions of this Treaty and of the Treaty on the Functioning of the European Union.” (Official Journal of the European Union, 2012)*

Pasal 3 Perjanjian Amsterdam:

*“The Union shall offer its citizens an area of **freedom, security and justice** without internal frontiers, in which the free movement of persons is ensured in conjunction with appropriate measures with respect to external border controls, asylum, immigration and the prevention and combating of crime.” (Official Journal of the European Union, 2012).*



Isi dari Perjanjian Amsterdam tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan Perjanjian Schengen yang terdapat pada isi Perjanjian Schengen berikut ini (*Official Journal of the European Communities, 2000*):

*“Aware that the ever closer union of the peoples of the Member States of the European Communities should find its expression in the freedom to cross internal borders for all nationals of the Member States and in the free movement of goods and services.”*

*“Prompted by the resolve to achieve the abolition of checks at their common borders on the movement of nationals of the Member States of the European Communities and to facilitate the movement of goods and services at those borders.”*

Dari dua kesepakatan kebijakan tersebut dapat dijelaskan bahwa Uni Eropa sudah berusaha untuk melindungi wilayahnya dari ancaman luar negara dengan mengadopsi kesepakatan Schengen. Meskipun antar negara mereka melakukan pelonggaran dan pembebasan perbatasan antar negara untuk orang, barang, dan modal, Uni Eropa sepakat untuk membatasi arus kedatangan orang asing yang berasal dari negara non-anggota. Seperti misalnya setiap warga negara ketiga (non-negara anggota) harus membuat visa Schengen. Sehingga orang asing yang masuk ke Uni Eropa telah disaring dan diuji kelayakannya. Adapun persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 5 *Convention Implementing Schengen Agreement (CISA)*, yaitu (Brouwer, 2008); individu harus memiliki dokumen yang sah yang dapat memberikan izin untuk melintasi perbatasan, individu tersebut harus memiliki visa yang diwajibkan, individu tersebut harus bisa memperlihatkan dokumen tujuan dan persyaratan tinggal, dan harus memiliki cukup keuangan untuk tinggal dan kembali ke negara asalnya, individu yang tidak terdapat di *database* SIS maka ditolak masuk, individu tidak menjadi ancaman dalam segi kebijakan publik, keamanan nasional atau hubungan internasional.

Dengan demikian Uni Eropa memberikan regulasi yang bersifat pencegahan dan ini dapat digunakan sebagai cara Uni Eropa dalam menghadapi Euroskeptisisme. Pencegahan kejahatan yang berasal dari luar komunitas bahkan penyelundupan imigran gelap dapat diatasi melalui Perjanjian Schengen ini. Selain Perjanjian Schengen, terdapat regulasi lain untuk mempertahankan eksistensi Uni Eropa dari ancaman Euroskeptisisme ini, yaitu dengan membuat regulasi *Visa Information System (VIS)*. Regulasi ini ditujukan untuk mencegah adanya *‘visa shopping’* yaitu melakukan pengajuan aplikasi visa ke banyak negara-negara anggota Uni Eropa. Sehingga orang yang dianggap berbahaya (seperti teroris misalnya) dapat dipantau pergerakannya jika orang tersebut sudah pernah melakukan pengajuan aplikasi visa dan ditolak. Adapun tujuan dari VIS adalah (Brouwer, 2008); menjaga keamanan internal dan melawan serangan terorisme, memerangi penipuan penggelapan, mencegah adanya *visa shopping*, meningkatkan kemungkinan untuk pengembalian imigran ilegal, meningkatkan penerapan Konvensi Dublin.

Sedangkan pandangan skeptisme mengenai penampungan para pengungsi ini bisa jadi tantangan yang sepenuhnya belum bisa diakomodir oleh Uni Eropa. Meskipun Uni Eropa telah membuat regulasi Eurodac yang telah dijalankan sejak 2003 lalu dengan tujuan untuk memeriksa para pencari suaka dan imigran yang masuk ke Uni Eropa (Brouwer, 2008). Jika VIS untuk menjegah adanya *‘visa shopping’*, maka Eurodac untuk mencegah adanya *‘asylum shopping’* yaitu menghindari dan mencegah banyak pencari suaka mengajukan aplikasi suaka ke banyak negara-negara anggota. Tujuan lainnya adalah untuk memfasilitasi Konvensi Dublin 1990 mengenai penerimaan pengungsi.

Selain Eurodac, Uni Eropa juga membuat regulasi Schengen *Information System II* yaitu negara anggota dapat mengakses informasi mengenai pencurian, penyalahgunaan atau kehilangan dokumen serta menguji aplikasi visa (Brouwer, 2008). Regulasi-regulasi tersebut merupakan upaya kebijakan dari Uni Eropa untuk



menanggulangi para pengungsi, namun besarnya gelombang pengungsi dari luar negara Uni Eropa membuat protes bagi negara anggota. Uni Eropa yang sebelumnya telah sepakat untuk menerima para pengungsi, saat ini dengan terpaksa negara-negara anggotanya menerima para pengungsi tersebut. Hal ini yang kemudian meningkatkan sentimen negatif terhadap Uni Eropa. Jika dianalisis lebih jauh, terdapat nilai-nilai yang berbeda yang dimiliki antara negara anggota dengan Uni Eropa. Uni Eropa yang menerapkan liberalisme bersifat positif dan harus membantu para pengungsi bertujuan agar dunia lebih damai. Sebaliknya, negara anggota melihat pengungsi sebagai ancaman ketahanan nasional negara. Pandangan ini lebih kepada realisme yang mengharuskan negara mengamankan kepentingan nasionalnya dari ancaman eksternal. Uni Eropa juga membuat kebijakan *Common European Asylum System* yang telah diimplementasi pada tahun 1999 sebagai bentuk pertanggungjawaban Uni Eropa dalam menangani pengungsi yang datang ke negara mereka (Setiabudi, 2021).

Dalam segi ekonomi, Uni Eropa dalam menghadapi Euroskeptisisme dengan cara membuat kebijakan membentuk *European Central Bank* (ECB). Bank sentral ini berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi sehingga Uni Eropa dapat bertahan dari krisis moneter di tahun 2008, 2018, dan 2020 lalu. Selain itu dapat mengurangi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar sehingga pengusaha baik besar dan kecil mendapatkan kepastian moneter. Bank sentral yang juga menerbitkan mata uang euro ini membuat Uni Eropa memiliki pengaruh yang lebih besar di panggung global seperti penggunaan euro sebagai mata uang transaksi dagang dengan nilai tinggi saat ini dan menjadi mata uang yang banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa pada saat pandemi Covid-19 lalu membuat negara-negara anggotanya sangat turun ekonominya maka ECB mengeluarkan program *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP). Adapun dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi krisis ekonomi akibat Covid-19 tersebut adalah sebesar € 1.350 miliar dan suku bunga yang rendah (European Union, 2020). Kebijakan bank sentral tersebut telah membuktikan bahwa Uni Eropa sebagai suatu rezim internasional telah melakukan tugasnya untuk melindungi negara-negara anggotanya dari krisis moneter. Program tersebut bertujuan untuk memberikan stimulus kepada bisnis besar, menengah, dan kecil dari dampak krisis Covid-19 (Abror & Damayanti, 2021). Selain ECB yang telah memberikan bantuan keuangan untuk menanggulangi krisis, Komisi Eropa juga telah memberikan bantuan keuangan berupa dana investasi Corona Investment Fund sebanyak €37 miliar yang diberikan kepada banyak pihak terdampak Covid-19 (European Union Agency for Fundamental Rights, 2020). Sehingga dapat dilihat kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Uni Eropa dapat menekan pandangan Euroskeptisisme yang saat ini melanda Uni Eropa.

Di lain sisi, Uni Eropa juga menjadi *shelter* bagi negara-negara anggotanya. Sepertinya misalnya melindungi pasar Uni Eropa dari produk-produk luar. Uni Eropa menerapkan REDD+ untuk melindungi pasar domestik mereka, dengan adanya itu mereka dapat menolak semua produk dari luar Uni Eropa jika produk yang dihasilkan merusak lingkungan. Uni Eropa menolak produk CPO Indonesia dengan alasan adanya perusakan lingkungan dan pekerja anak. Padahal dasar penolakan mereka jika dilihat lebih lanjut yaitu pasar mereka terganggu dengan adanya CPO Indonesia. Minyak matahari, minyak zaitun, dan *rapeseed* merupakan komoditas lokal Uni Eropa berupa minyak sayur. Minyak-minyak tersebut memiliki harga yang mahal ketimbang dengan minyak yang dihasilkan dari sawit/CPO. Selain itu CPO juga memiliki turunan yang banyak dan dapat digunakan untuk berbagai produk seperti shampo, sabun, makanan, kosmetik, dan sebagainya. Sedangkan minyak-minyak yang dihasilkan oleh Uni Eropa tidak sekompetitif CPO. Sehingga melalui regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa ini membuat negara-negara anggota terlindungi pasarnya.

Maka isu Euroskeptisisme ini bisa menjadi batu sandungan bagi integrasi politik dan ekonomi Uni Eropa dan tidak menutup kemungkinan jika benar-benar terjadi disintegrasi Uni Eropa bisa membuat Eropa kembali lagi ke masa-masa proteksi pasar masing-masing negara Eropa dan pasar Eropa bisa dibanjiri oleh



produk-produk dari negara lain seperti Tiongkok dan Indonesia. Hal ini dikarenakan proteksi pasar yang tidak dilakukan bersama Uni Eropa kekuatannya tidak besar. Jika Eropa ingin tetap kuat baik secara politik maupun ekonomi di panggung internasional sudah semestinya mereka tetap di dalam satu rezim internasional yang dapat mengakomodir semua kepentingan nasional negara-negara anggotanya yaitu Uni Eropa.

Lalu bagi pihak-pihak yang anti integrasi Eropa sudah seharusnya mereka memiliki sikap oposisi sebagai penegakan prinsip dari demokrasi agar kekuasaan Uni Eropa tidak disalahgunakan dan bersifat otoriter. Sehingga dapat melakukan *check and balance* terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa. Dengan demikian Uni Eropa memberikan kebijakan yang adil dan transparan serta dapat mengakomodir setiap kepentingan nasional negara anggotanya. Tentu ini bisa menjadi keuntungan bagi negara-negara anggota karena rezim Uni Eropa memiliki citra internasional yang baik di mata global. Melalui kekuatan politik dan ekonomi yang dimilikinya telah membuat negara anggota yang menjadi bagiannya mendapatkan citra yang baik juga. Bahkan dapat menjadi senjata bagi negara anggota untuk menolak suatu kebijakan perdagangan internasional karena dilakukan secara bersama-sama di regional mereka. Ini dimata *World Trade Organization* adalah sah karena dilakukan secara regional beda jika dilakukan secara sepihak oleh satu negara yang mana hal tersebut terlarang.

Euroskeptisisme terjadi dikarenakan adanya kebijakan Uni Eropa yang dianggap tidak transparan dan gagal memenuhi kepentingan nasional negara anggotanya. Seperti yang dinyatakan oleh Kaplan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Uni Eropa seperti krisis ekonomi, pengungsi, ancaman teroris belum bisa diatasi sepenuhnya oleh Uni Eropa. Adanya gelombang pengungsi membuat homogenitas sosial dan masyarakat Uni Eropa menjadi terintervensi sehingga terjadi benturan antar masyarakat. Selain isu sosial dan budaya, isu yang dihadapi oleh Uni Eropa adalah perdagangan internasional. Di era perdagangan bebas yang semakin luas membuat ancaman-ancaman bagi negara anggota Uni Eropa seperti masifnya produk dari Tiongkok yang masuk ke Uni Eropa dan bahkan kalah saingnya secara ekonomis minyak lokal mereka dengan CPO dari Indonesia.

Isu-isu tersebut membuat menguatkan Euroskeptisisme dari elit politik negara anggota dan masyarakat di dalamnya. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan elit politik Uni Eropa. Di dalam artikel ini, peneliti menemukan beberapa cara yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam membendung sikap Euroskeptisisme dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Dalam masalah ekonomi seperti misalnya minyak lokal yaitu minyak zaitun dan minyak matahari yang mendapatkan ancaman dari CPO Indonesia. Uni Eropa membuat regulasi yang melindungi pengusaha lokal seperti *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)*. Sedangkan dalam hal masalah isu terorisme, pengungsi, dan imigrasi Uni Eropa melakukan penguatan pada kebijakan pada kesepakatan Schengen dan Eurodac. Kesepakatan ini untuk memperketat arus lintas batas negara baik di dalam Uni Eropa maupun dengan negara ketiga yaitu non-negara Uni Eropa. Temuan lain agar Euroskeptisisme ini semakin berkurang, Uni Eropa dalam hal isu ancaman krisis ekonomi mengedepankan kesepakatan bantuan ekonomi yang dikeluarkan oleh *European Central Bank (ECB)*. Seperti bantuan pada masa Covid-19 Uni Eropa menyediakan dana dalam program *Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)* sebesar € 1.350 miliar. Sehingga dapat ditemukan bahwa Euroskeptisisme ini dapat ditangani dengan cara transparansi kebijakan dan perkuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas organisasi. Seperti pembuatan regulasi REDD+, pembuatan kebijakan Schengen, dan program dana bantuan dari ECB.

Jika ditinjau lebih dalam lagi, sikap Euroskeptisisme yang terjadi ini menjadi dipertanyakan kembali kerelevannya. Jika negara-negara anggota Uni Eropa satu-persatu meninggalkan organisasinya apakah akan dapat bertahan lebih baik dari masifnya ancaman-ancaman global tersebut? Maka, di sini peneliti menyarankan untuk kembali melakukan pendalaman dan elaborasi masa depan Uni Eropa. Bagaimana



eksistensi Uni Eropa dan negara anggotanya dalam bertahan dari disrupsi global jika keluar dari Uni Eropa. Apakah negara-negara tersebut dapat bertahan lebih baik tanpa Uni Eropa atau sebaliknya yaitu semakin kuat ancaman-ancaman global yang dapat mengecilkan negara Eropa tersebut.

## KESIMPULAN

Tantangan Uni Eropa mengenai pandangan Euroskeptisisme harus dihadapi dengan membuat banyak solusi dan kebijakan agar dapat mengimbangi pandangan negatif terhadap Uni Eropa. Pandangan mengenai kedaulatan yang dianggap tergadaikan tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya juga salah. Karena Uni Eropa merupakan bagian entitas tersendiri di sistem internasional, maka bukan tidak mungkin Uni Eropa juga memiliki kedaulatannya sendiri yang harus dihormati semua negara di dunia. Sehingga, negara yang memiliki kepentingan dengan negara Eropa maka mereka juga harus bernegosiasi untuk dengan Uni Eropa sebagai entitas yang menaungi negara-negara anggotanya. Pandangan Euroskeptisisme ini bisa menjadi perbaikan dari Uni Eropa agar memberikan kebermanfaatannya yang berkesinambungan bagi negara anggotanya. Terutama dalam hal peningkatan ekonomi, melindungi ancaman eksternal, penanganan pengungsi, dan isu-isu global kontemporer lainnya.

Kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh Uni Eropa menjadi bentuk akomodasi dari pihak-pihak yang memiliki pandangan Euroskeptisisme. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut untuk merespon isu krisis ekonomi, gelombang pengungsi, dan masalah perbatasan. Dalam isu krisis ekonomi Uni Eropa memberikan bantuan dana melalui *European Central Bank* (ECB) dan Komisi Eropa sehingga negara-negara yang mengalami krisis ekonomi terutama pada masa pandemi Covid-19 dapat memperbaiki keadaan ekonominya. Sedangkan dalam isu pengungsi, Uni Eropa telah membuat kebijakan *Common European Asylum System* dan Eurodac untuk mengatasi permasalahan pengungsi ini. Dalam hal keamanan perbatasan, Uni Eropa telah membuat kebijakan dengan mengadopsi Kesepakatan Schengen dan *Visa Information System* (VIS). Sehingga dapat menyaring orang-orang dari negara ketiga (non-anggota Uni Eropa) yang ingin masuk ke dalam Uni Eropa. Dengan demikian masalah ancaman terorisme dan kejahatan transnasional dapat diatasi oleh Uni Eropa.

Semangat integrasi Eropa ini patut dipertimbangkan bagi banyak regionalisme lain seperti ASEAN, MERCOSUR, dan Africa Union. Secara langsung maupun tidak langsung membuat perlindungan bagi negara anggotanya dari ancaman disrupsi global. Memberikan kenyamanan dari segi kepastian hukum internasional dan isu krisis keuangan. Negara dapat bersama-sama menyampaikan aspirasinya dalam suatu forum internasional dan meminta rezim internasional untuk melindungi kepentingan nasional mereka dari ancaman kejahatan transnasional, krisis pengungsi, krisis ekonomi, dan isu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. Y., & Damayanti, L. (2021). *Dampak Multidimensi Covid-19 Uni Eropa*. LIPI.
- Brack, N., & Startin, N. (2015). Introduction: Euroscepticism, from the Margins to the Mainstream. *International Political Science Review*, 239-249.
- Brouwer, E. (2008). *Immigration and Asylum Law and Policy in Europe*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Council of the European Union. (2023). *The Schengen Area*. Diambil kembali dari <https://data.europa.eu/doi/10.2860/64700>
- Ebru, O. (2019). Mainstreaming euroscepticism in European politics. *Eastern Journal of European Studies*, 19-40.



- European Union Agency for Fundamental Rights. (2020). *Coronavirus Pandemic in The EU–Fundamental Rights Implications*. Publications Office of the European Union.
- European Union. (2020). *European Economic Forecast*. Publications Office of the European Union.
- Eurostat. (2023). *First-time asylum applicants (non-EU citizens), EU, 2008–2022*. Eurostat.
- Fomina, J. (2017). The Unlikely Eurosceptics: the Undercurrent Anti-European Attitudes among the Young Poles and the Role of the Domestic Context. *Polish Sociological Review*, 141-165.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2007). Sources of Euroscepticism. *Acta Politica*, 119-127.
- Glencross, A. (2023). Riding the Eurosceptic tiger vs taming it by technocracy: the UK and France as Two Ideal Types of How to Manage Hard Euroscepticism. *Journal of European Integration*, 785-802.
- Kaplan, Z. (2023). Brexit Dilemma and the Future of Euroscepticism. *Journal of Economics Business and Political Researches*, 618-629.
- Kopecky, P., & Mudde, C. (2002). The Two Sides of Euroscepticism. *European Union Politics*, 297-326.
- Likaj, X., Rieble, L., & Theuer, L. (2020). Euroscepticism in France: An Analysis of Actors and Causes. *Institute for International Political Economy Berlin*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed)*. California: Sage Publications.
- Official Journal of the European Union. (2012). *Consolidated Version of The Treaty on European Union*. Official Journal of the European Union.
- Official Journal of the European Communities. (2000). *The Schengen Acquis, Integrated into the European Union*. European Union.
- Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic di Eropa. *Wanua*, 13-35.
- Ultan, M. O., & Ornek, S. (2015). Euroscepticism in the European Union. *International Journal of Social Sciences*, 49-57.
- Vasilopoulou, S. (2018). The Party Politics of Euroscepticism in Times of Crisis: The Case of Greece. *Political Studies Association*, 311-326.
- Vasilopoulou, S. (2009). Varieties of Euroscepticism: The Case of the European Extreme Right. *Journal of Contemporary European Research*, 3-23.
- Vasilopoulou, S., & Talving, L. (2023). Euroscepticism as a Syndrome of Stagnation? Regional Inequality and Trust in the EU. *Journal of European Public Policy*, 1494-1515.
- van Elsas, E. J., Hakhverdian, A., & van der Brug, W. (2016). United against a common foe? The nature and origins of Euroscepticism among left-wing and right-wing citizens. *West European Politics*, 1181-1204.